

BAB I

PENDAHULUAN

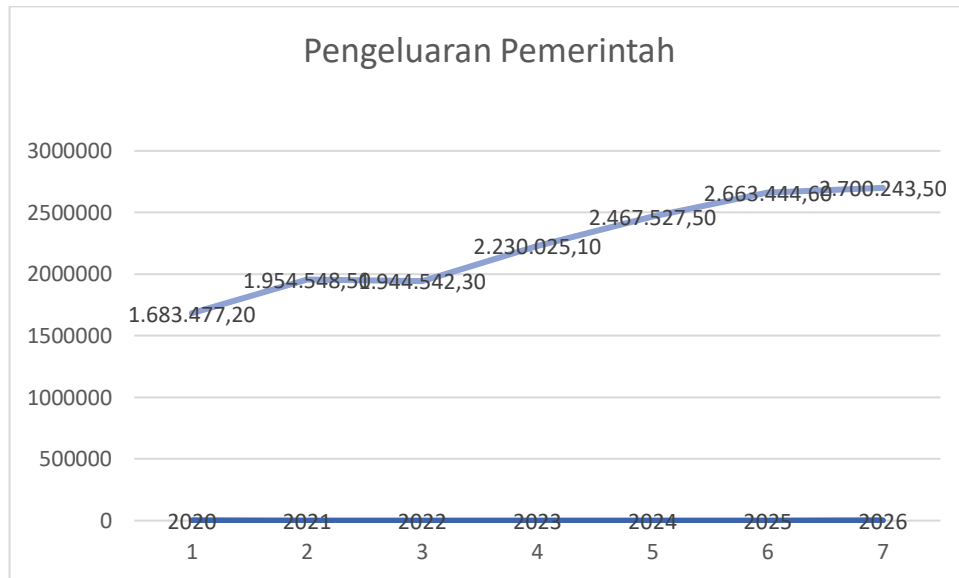
1.1 Latar Belakang

Hubungan antara pengeluaran publik dan investasi swasta di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan memiliki banyak sisi yang telah menarik perhatian para ekonomi dan pembuat kebijakan. Memahami hubungan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan ekonomi yang efektif yang dapat mendorong pertumbuhan dan pembangunan. Pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi investasi swasta melalui berbagai cara, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yang artinya pengeluaran pemerintah dapat meningkatkan investasi swasta. Nofrianto et al, (2021) menemukan bahwa belanja pemerintah secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi, yang menunjukkan bahwa peningkatan belanja pemerintah dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investasi swasta untuk berkembang.

Pengeluaran pemerintah (publik) adalah uang atau dana yang keluar dari kas negara untuk membiayai aktivitas pemerintah atau tujuan lain yang menjadi kewenangan pemerintah (Aries Djaenuri, 2016). Pada kenyataannya, pengeluaran pemerintah memiliki kecenderungan meningkat dari tahun ke tahun di negara

sedang berkembang karena menjalankan fungsi sebagai *agent of development* dan seiring pula dengan peningkatan ekonomi di suatu negara (Nahumuri, 2019).



Sumber: Kementerian Keuangan, 2026

Gambar 1.1 Anggaran Belanja Pemerintah Pusat (Triliun)

Peningkatan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat dalam lima tahun terakhir memiliki dampak yang signifikan terhadap investasi swasta di Indonesia. Secara umum, peningkatan belanja negara dapat menciptakan efek multiplier bagi sektor swasta melalui pembangunan infrastruktur, insentif fiskal, serta stabilisasi ekonomi. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 melanda, peningkatan belanja menjadi Rp1.683,5 triliun menunjukkan respons fiskal yang agresif untuk menjaga stabilitas ekonomi, yang juga berkontribusi dalam menjaga minat investor terhadap pasar domestik (Kementerian Keuangan, 2021).

Pada tahun 2021, belanja pemerintah meningkat tajam menjadi Rp1.954,5 triliun, yang sebagian besar dialokasikan untuk pemulihan ekonomi nasional.

Berbagai stimulus dan insentif pajak diberikan kepada sektor swasta guna mendorong investasi di tengah ketidakpastian ekonomi. Sektor yang paling mendapat manfaat dari kebijakan ini adalah industri manufaktur, kesehatan, serta digitalisasi. Dengan adanya stimulus dari pemerintah, investasi swasta di beberapa sektor mulai pulih, meskipun masih ada tantangan dari sisi permintaan global yang belum sepenuhnya kembali normal (BKPM, 2022).

Pada tahun 2022, belanja negara sedikit turun menjadi Rp1.944,5 triliun, yang menunjukkan adanya pergeseran dari kebijakan stimulus menuju kebijakan normalisasi fiskal. Meskipun demikian, peran pemerintah dalam menjaga daya tarik investasi tetap besar, terutama dengan kebijakan reformasi struktural seperti Undang-Undang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha. Penurunan belanja negara yang tidak terlalu drastis juga menunjukkan upaya pemerintah dalam menjaga keseimbangan fiskal tanpa mengurangi insentif bagi dunia usaha. Hal ini membuat investasi swasta tetap tumbuh, terutama di sektor energi hijau dan ekonomi digital (BPS, 2022).

Kemudian pada tahun 2023, anggaran belanja melonjak signifikan menjadi Rp2.230,0 triliun, yang didorong oleh berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, subsidi energi, dan persiapan Pemilu 2024. Kemudian Pada tahun 2024, belanja pemerintah pusat mencapai Rp. 2.467,53 triliun atay tumbuh sekitar 10-18% YoY, menurut data dari media resmi Kementerian Keuangan dan BPS. Ekspansi anggaran ini mencerminkan pendekatan proaktif terhadap tantangan global dan dorongan pembangunan pasca-pandemi, khususnya dari sisi belanja infrastruktur dan program prioritas nasional. Kenaikan ini

memberikan sinyal positif bagi investor swasta, karena belanja pemerintah yang tinggi sering kali menciptakan peluang bisnis baru. Peningkatan pembangunan infrastruktur, misalnya, dapat mendorong investasi di sektor properti dan logistik. Selain itu, insentif pajak dan kebijakan investasi yang lebih fleksibel diharapkan semakin menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar negeri (Kemenkeu, 2024). Kemudian pada tahun 2025, pengeluaran pemerintah meningkat mencapai 2.663.444,60, dan mencapai 2.700.243,50 pada tahun 2026. Peningkatan ini menunjukkan semakin besarnya peran pemerintah dalam mendorong pembangunan ekonomi, menyediakan layanan publik, serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di Indonesia memiliki kecenderungan meningkat dalam jangka panjang, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan aktivitas pembangunan dan pelayanan publik. Peningkatan belanja pemerintah juga dapat menjadi salah satu instrumen kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengeluaran publik merupakan instrument fiskal yang digunakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan iklim investasi yang kondusif. Menurut Gemmeil et al. (2011), komposisi pengeluaran pemerintah, terutama jika diarahkan ke sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, Pendidikan, dan Kesehatan, dapat meningkatkan efisiensi ekonomi dan menarik investasi swasta melalui penciptaan eksternalitas yang positif. Belanja pada sektor ekonomi dan pelayanan umum, misalnya dapat mengurangi biaya logistic, serta

memperbaiki kualitas institusi dan pelayanan publik yang menjadi perhatian utama investor. Selain itu, studi oleh Aschauer (2012) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur memiliki korelasi positif yang kuat terhadap investasi swasta, karena dapat meningkatkan produktivitas modal swasta. Sejalan dengan itu, Bank dunia (2020) juga menekankan bahwa peran belanja pemerintah yang efisien dapat memperkuat kepercayaan investor, khususnya di negara berkembang seperti Indonesia.

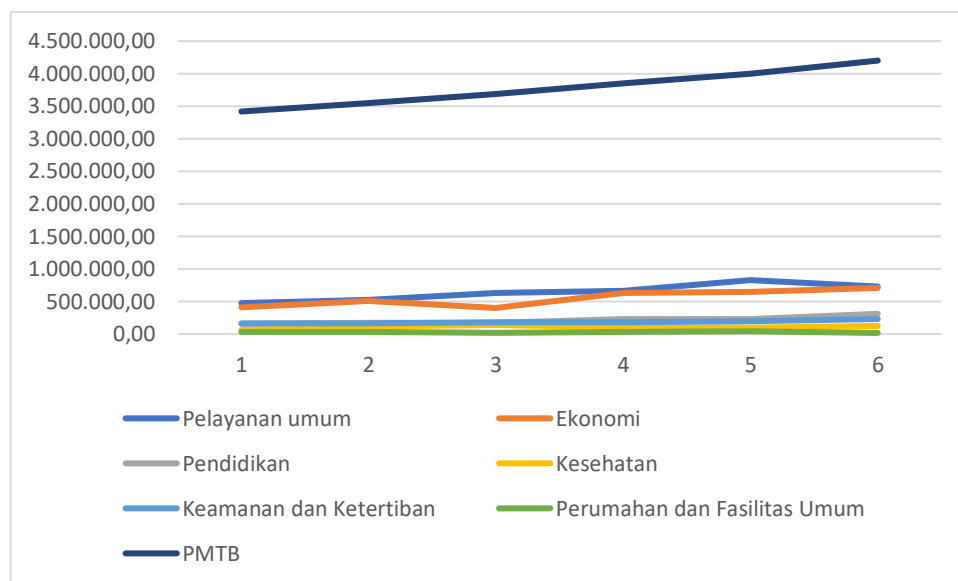
Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (*developing countries*) termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar (Yunan, 2012).

Investasi memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui kegiatan investasi, modal yang masuk dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan sektor usaha, menciptakan peluang kerja, memperkuat proses produksi, serta mempercepat transfer teknologi. Selain itu, investasi juga berkontribusi dalam memperluas jangkauan produk nasional ke pasar global melalui ekspor. Guna meningkatkan tingkat investasi, pemerintah perlu mengambil Langkah strategis berupa kebijakan perluasan fiskal yang menyeluruh dan tidak dapat dihindari (Fitrianti et al., 2015).

Investasi merupakan indikator yang dapat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam perekonomian suatu negara. Pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang (*developing countries*) termasuk didalamnya pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, memiliki dana yang cukup besar (Yunan, 2012).

Menurut Indra Suhendra (2007), Investasi merupakan satu bagian penting dari pembangunan ekonomi, terutama dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan kerangka tersebut, penting untuk terlebih dahulu meninjau tren dan struktur pengeluaran pemerintah menurut fungsi belanja dan investasi swasta (PMTB) selama beberapa tahun terakhir.



Sumber: BPS, Bank Indonesia, 2025

Gambar 1.2 Pengeluaran Pemerintah Berdasarkan Fungsi (Milyar Rupiah) dan Investasi Swasta (PMTB, ADHK 2010)

Berdasarkan grafik perkembangan pengeluaran publik menurut fungsi dan investasi swasta (PMTB) di Indonesia periode 2020-2025, terlihat bahwa secara umum pengeluaran publik menunjukkan kecenderungan meningkat pada hampir seluruh sektor. Peningkatan paling menonjol terjadi pada sektor pelayanan umum dan ekonomi, sementara sektor Pendidikan, Kesehatan, serta perumahan dan fasilitas umum mengalami peningkatan yang relatif lebih moderat. Kondisi ini

mencerminkan adanya ekspansi peran pemerintah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik selama periode pengamatan.

Di sisi lain, investasi swasta yang direpresentasikan oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) juga menunjukkan tren meningkat dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan PMTB berlangsung secara relatif stabil dan cenderung linear, tanpa menunjukkan lonjakan yang signifikan seiring dengan kenaikan pengeluaran publik. Hal ini mengindikasikan bahwa peningkatan belanja pemerintah belum sepenuhnya direspons secara langsung oleh investasi swasta, terutama dalam jangka pendek. Dengan kata lain, hubungan antara pengeluaran publik dan investasi swasta belum menunjukkan pergerakan yang kuat dan searah.

Perbedaan pola pergerakan antara pengeluaran publik dan PMTB tersebut mengindikasikan bahwa dampak pengeluaran publik terhadap investasi swasta bersifat tidak langsung dan memerlukan jeda waktu tertentu. Selain itu, komposisi pengeluaran publik yang lebih dominan pada sektor-sektor tertentu juga berpotensi memengaruhi efektivitas belanja pemerintah dalam mendorong investasi swasta. Oleh karena itu, diperlukan analisis empiris lebih lanjut untuk menguji apakah pengeluaran publik di Indonesia cenderung menimbulkan efek *crowding-in* atau *crowding-out* terhadap investasi swasta, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

Dalam beberapa dekade terakhir, pengeluaran publik di Indonesia menunjukkan kecenderungan meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan pembangunan dan peran pemerintah dalam mendorong pemulihan ekonomi. Peningkatan belanja pemerintah, khususnya pada sektor-sektor produktif seperti

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, diyakini mampu menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang dapat mendorong aktivitas ekonomi dan investasi swasta (Kuncoro, 2018). Melalui penyediaan infrastruktur dan layanan publik yang memadai, biaya produksi sektor swasta dapat ditekan sehingga meningkatkan daya tarik investasi.

Namun demikian, hubungan antara pengeluaran publik dan investasi swasta tidak selalu bersifat positif. Dalam literatur ekonomi, hubungan ini dikenal melalui dua mekanisme utama, yaitu efek *crowding-in* dan *crowding-out*. Efek *crowding-in* terjadi ketika peningkatan pengeluaran pemerintah mampu mendorong investasi swasta melalui peningkatan produktivitas, perbaikan infrastruktur, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebaliknya, efek *crowding-out* terjadi ketika peningkatan pengeluaran pemerintah justru menekan investasi swasta, terutama melalui peningkatan kebutuhan pembiayaan pemerintah yang dapat mendorong kenaikan suku bunga dan menyerap sumber daya ekonomi yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh sektor swasta (Traum & Yang, 2010).

Pandangan Keynesian menekankan bahwa pengeluaran pemerintah dapat berperan sebagai stimulus ekonomi, khususnya ketika sektor swasta belum mampu berinvestasi secara optimal. Dalam kondisi tersebut, belanja pemerintah dapat meningkatkan permintaan agregat dan mendorong investasi swasta (*crowding-in*) (Cantore et al., 2012). Sebaliknya, pandangan neoklasik berargumen bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah yang dibiayai melalui utang berpotensi meningkatkan suku bunga dan menurunkan investasi swasta (*crowding-out*), karena meningkatnya biaya modal (Jorgenson, 1963).

Di Indonesia, efektivitas pengeluaran publik dalam mendorong investasi swasta sangat bergantung pada komposisi sektor belanja pemerintah. Pengeluaran publik yang bersifat produktif dan berorientasi jangka panjang, seperti pendidikan dan infrastruktur dasar, cenderung memberikan dampak positif terhadap investasi swasta. Sebaliknya, pengeluaran yang bersifat administratif dan konsumtif berpotensi menimbulkan efek *crowding-out* karena tidak secara langsung meningkatkan kapasitas produksi perekonomian (Afonso & Aubyn, 2019)

Selain pengeluaran pemerintah, suku bunga juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi investasi swasta. Suku bunga yang tinggi dapat menghambat peminjaman dan investasi, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat menstimulasi investasi swasta dengan membuat pembiayaan lebih mudah di akses. Ado dan Mulken menemukan bahwa ketidakpastian permintaan, ketidakpastian suku bunga, dan ketidakpastian nilai tukar mata uang asing secara signifikan mempengaruhi investasi swasta (Ado & Mulken, 2021). Demikian pula, Ahmed dan Qayyum menunjukkan bahwa pengeluaran pembangunan publik secara positif merangsang investasi swasta, sementara ketidakstabilan makroekonomi dan suku bunga yang tinggi memiliki efek yang merugikan (Ahmed & Qayyum, 2022). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa inflasi berdampak negatif terhadap keputusan investasi swasta, karena mempersulit perencanaan jangka panjang dan mengurangi daya tarik peluang investasi (Ababio et al., 2018).

Berbagai penelitian telah dilakukan guna mengetahui dampak pengeluaran publik terhadap investasi swasta. (Yusuf Bahtiar, 2015), meneliti dan menganalisis tentang Dampak Pengeluaran Pemerintah Terhadap Investasi Swasta. Penelitiannya

menemukan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap investasi swasta, namun pengaruh tersebut tampaknya kurang terbukti. Selain itu, anggapan Moneteris klasik yang beranggapan bahwa investasi akan terdesak oleh peningkatan pengeluaran pemerintah tampaknya justru terbukti. Peningkatan pengeluaran pemerintah tidak selalu diiringi dengan peningkatan defisit anggaran yang sama, dan hal ini memberikan pengaruh berbeda terhadap investasi.

Tingkat suku bunga menjadi salah satu elemen penting yang memengaruhi keputusan seseorang dalam berinvestasi maupun melakukan ekspor. Ketika suku bunga tinggi, minat untuk berinvestasi cenderung menurun. Sebaliknya, jika suku bunga rendah, dorongan untuk berinvestasi meningkat. Hal ini disebabkan karena suku bunga dianggap sebagai “biaya” yang harus ditanggung investor saat mengajukan pinjaman ke bank guna membiayai kegiatan investasinya. (Fahrika, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Pradyumna Dash (2016) yang meneliti tentang dampak investasi publik terhadap investasi swasta di India selama periode 1970-2013. Penelitian tersebut menemukan hasil bahwa peningkatan 1 persen dalam investasi publik sebagai rasio terhadap PDB mengakibatkan penurunan investasi swasta sebagai rasio terhadap PDB sebesar 0,81 persen dalam jangka Panjang (sekitar 4 hingga 5 tahun) dan 0,53 persen dalam jangka pendek (sekitar 2 hingga 3 tahun), setelah itu mengendalikan kondisi ekonomi. Selain itu, efek crowding out dari investasi publik terhadap investasi swasta telah berkurang selama periode pasca-liberalisasi.

Pengeluaran publik Indonesia terus meningkat secara signifikan setiap tahun, dengan fokus yang signifikan pada sektor infrastruktur. Namun, untuk menentukan apakah peningkatan ini telah meningkatkan investasi swasta, masih diperlukan bukti empiris. Penelitian ini relevan karena pemerintah juga berjuang untuk memastikan pengeluaran publik tidak didominasi oleh belanja konsumtif. Karena ada kemungkinan hasil yang bertentangan, penelitian ini diperlukan untuk mengevaluasi kondisi khusus yang berlaku di suatu negara atau periode tertentu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian dalam proposal ini sebagai berikut:

1. Apakah pengeluaran publik di bidang Pelayanan umum berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia?
2. Apakah pengeluaran publik di bidang Ekonomi berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia?
3. Apakah pengeluaran publik di bidang Pendidikan berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia?
4. Apakah pengeluaran publik di bidang Kesehatan berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia?
5. Apakah pengeluaran publik di bidang Ketertiban dan Keamanan berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia?
6. Apakah pengeluaran publik di bidang Perumahan dan fasilitas umum berpengaruh positif terhadap investasi swasta di Indonesia?

7. Apakah suku bunga berpengaruh negatif terhadap investasi swasta di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis pengaruh pengeluaran publik di berbagai sektor (pelayanan umum, ekonomi, pendidikan, kesehatan, Ketertiban dan Keamanan, serta Perumahan dan Fasilitas Umum) dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap investasi swasta di Indonesia.
2. Menentukan apakah pengeluaran publik crowding-in atau crowding-out dalam jangka panjang maupun jangka pendek terhadap investasi swasta di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Terdapat 2 manfaat dalam penelitian ini, yakni secara teoritis dan secara praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ilmu ekonomi, terkhususnya pada bidang ilmu ekonomi publik, ekonomi makro dan ekonomi pembangunan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Untuk peneliti, mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi, wawasan, serta informasi terkait masalah yang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan bukti empiris yang mendukung

pembuatan kebijakan fiskal dan pengeluaran publik yang lebih efektif untuk meningkatkan investasi swasta.